

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sistem kebebasan dalam memilih, dan itu merupakan istilah yang paling banyak dipahami masyarakat umum, meskipun sebenarnya pemahaman tersebut mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu. Adapun keterbatasan-keterbatasan berdemokrasi sifatnya umum, karena demokrasi merupakan konsep politik Barat yang dipandang lebih jelas dan pasti (*taken for granted*) sebagai cara terbaik untuk meningkatkan kehidupan suatu bangsa.

Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Lahirnya konsep demokrasi dapat ditelusuri mulai pada sidang BPUPKI (1945) yang pada umumnya para *founding father* menghendaki bahwa negara Indonesia merdeka haruslah negara demokrasi. Perbedaan yang terjadi adalah mengenai hak-hak demokrasi warga negara. Pandangan pertama yang diwakili Mr. R. Soepomo dan Ir. Soekarno, menentang dimasukkannya hak-hak tersebut dalam konstitusi, sementara pandangan kedua yang diwakili Hatta dan Mr. Muh. Yamin, memandang perlu pencantuman hak-hak warga negara dalam undang-undang dasar.¹

¹ Pada tanggal 15 juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dilaksanakan di Pejambon, terlibat dalam debat panas, Soekarno dan Soepomo dengan lantang menolak kebebasan berdemokrasi. Tetapi Hatta dan Muhammad Yamin dan seluruh anggota BPUPKI yang lain mendukungnya. Soekarno menolak berdasarkan argumen. Bahwa warga negara secara individual memiliki hak-hak dasar tertentu sama saja membuka jalan bagi individualisme “Kita rancang UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu.”

Gagasan yang kedua menurut Soekarno, rakyat perlu melakukan keadilan sosial, padahal kebebasan-kebebasan itu “tidak bisa mengisi perut orang-orang sedang kelaparan”. Hatta pun juga menolak liberalisme. Hatta pun mengajukan suatu kekhawatiran yang ternyata di luar bayangan Soekarno. Menurut Hatta, “*Jangan kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu merupakan sebuah negara kekuassan.*” Hatta juga mengkhawatirkan datangnya negara kekuasaan. Hatta tidak mau mempertentangkan keadilan sosial dengan hak-hak demokrasi. Dalam pidatonya di Aceh, Hatta mengutarakan:

“apakah yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain dari pada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segi penghidupannya diperlukan secara adil dengan tiada dibedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintah negara dari atas sampai kebawah berdasarkan kedaulatan rakyat.”²

Hatta menyadari hal yang sangat penting, keadilan sosial, dan sebagai akibatnya, kesejahteraan rakyat, justru mengandaikan kedaulatan rakyat. Agar rakyat bisa hidup dengan layak, maka kedaulatan rakyat perlu adanya. Hatta membuktikan diri sebagai penganalisis yang lebih tajam, sedangkan Soekarno tidak memilih hubungan antara ketidak adilan sosial dan keadaan yang tidak demokratis. Rakyat kelaparan bukan karena kemiskinan, melainkan rakyat tidak bisa apa-apa. Menciptakan keadilan sosial mengandaikan pemberdayaan demokrasi kerakyatan. Menurut Hatta, keputusan yang demokratis harus melibatkan lebih banyak orang. Hatta memberikan jaminan agar rakyat bebas dari

² Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat*. Jogjakarta : Garansi, 2010, hlm. 109-117.

kaum penindas, dan mempunyai hak untuk menolak peraturan yang dianggap kurang adil.

Bangsa Indonesia mempunyai banyak pejuang kemerdekaan, lebih kurang 68 orang (anggota BPUPKI) yang diakui sebagai bapak pendiri bangsa. Dari pejuang yang sudah ditetapkan, hanya beberapa orang di antara mereka yang tampil ke depan dengan visi dan konsepsinya tentang bentuk kehidupan yang dicita-citakan setelah kemerdekaan. Pemikir dan pejuang yang dimaksud adalah seperti, Tan Malaka, Soekarno, dan Hatta. Merekalah yang dipandang sebagai pemikir dan pejuang kemerdekaan untuk memajukan bangsa Indonesia. Dari beberapa pejuang tersebut, Hatta perlu diberikan perhatian tersendiri.³

Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit tinggi,⁴ di sanalah lahir seorang pemikir dan pemimpin yang jujur dan disiplin, muslim yang saleh, negarawan yang demokrat, dan ekonom yang beridiologi kerakyatan. Kepribadiannya sudah dibentuk dari gen dan lingkungan disertai dengan pengalaman-pengalaman hidupnya dari kecil serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang digelutinya.⁵ Sebagai pemuda yang beruntung mengenyam pendidikan di luar negeri dibandingkan dengan rakyat miskin yang serba kekurangan di tanah air, Hatta memiliki kesadaran untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan.

³ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 3-5.

⁴ Taufik Abdullah dalam kata pengantar buku, Mohhamad Hatta, *Untuk Negriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat betawi*. Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 1.

⁵ Salman Alfarizi, *op.cit.*, hlm. 11.

Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir melainkan sebagai tolak ukur untuk merangkul bangsa Indonesia melalui alur demokrasi politik dan demokrasi sosial untuk menjadikan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa. Hatta tidak setuju dengan demokrasi yang berasas pada kepentingan feodal. Hatta juga menolak demokrasi yang berasas demokrasi kepentingan satu golongan agama yang menindas golongan agama lainnya. Dari situlah, Hatta menolak demokrasi yang berdasarkan individualisme.⁶

Dari situ lah Hatta memberikan kritikan tentang demokrasi Barat sebagai berikut :

“jadinya, demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah adapula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, bahwa segala penghasilan yang mengenal penghidupan orang harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga”.⁷

Dari kutipan di atas Hatta berkata bahwa demokrasi Barat telah gagal menampilkan demokrasi yang sebenarnya, yaitu tidak adanya kedaulatan rakyat di semua aspek kehidupan. Demokrasi Barat hanya mempersoalkan kedaulatan rakyat di bidang politik saja, sedangkan di bidang ekonomi hanya kaum pemodal yang berhak mempunyai kedaulatan. Hatta memandang demokrasi Barat secara negatif, karena di dalam paham tersebut terdapat paham liberalisme yang telah melahirkan demokrasi Barat. Memang, semangat individualisme yang telah melahirkan demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam bidang politik, tetapi dengan

⁶ *Ibid.*, hlm. 105-106.

⁷ Zulfikri Suleman, *op.cit.*, hlm. 12-13.

adanya individualisme ini telah memunculkan kapitalisme di bidang ekonomi. Hatta menginginkan hak politik harus berada di tangan rakyat, supaya rakyat dapat mengembangkan hak demokrasinya. Rakyat secara sadar harus mempunyai peranan yang sama guna menghalangi dominasi kaum kapitalis dan feodal.

Dalam hal inilah sangat penting adanya: *pertama*, kebebasan berserikat dan berorganisasi. Didirikannya organisasi sangatlah perlu karena sebagai kekuatan pengimbang bagi kelompok bermodal, kelompok bersenjata, dan kelompok yang mendominasi masyarakat politik. Dominasi kelompok sebagian besar cenderung bergeser ke arah penyalagunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah hal tersebut, harus ada kekuatan penyeimbang. Untuk inilah perlu ada jaminan kebebasan berorganisasi. *Kedua*, kebebasan dalam mengutarakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Karena itu, ia menolak sensor pers. Agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh informasi-informasi bersifat indoktrinasi dan pemaksaan pendapat pun harus dicegah. Apabila hal tersebut tidak dicegah indoktrinasi akan semakin menjadi.

Ketiga, hak sanggahan secara massal yang sudah dikenal oleh masyarakat desa di Jawa sejak lama, harus dilakukan tanpa adanya kekerasan. Di masa sekarang, sanggahan massal bisa diwujudkan memalui bentuk surat poster massal, poling publik, gugatan publik, aksi dan wacana publik. Penguasa harus bisa memahami dan menanggapi sanggahan publik. *Keempat*, membangkitkan semangat gotong-royong, rasa kebersamaan, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu.

Kelima, pengembangan kekuatan ekonomi masyarakat dari bawah, *bottom-up*, dengan mengolah aksesibilitas rakyat kecil dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti tanah, hutan, laut, bahan mineral, fauna dan flora. Juga membuat aksebilitas rakyat kecil berupa modal dan kredit perbankan. Serta membuat aksibilitas rakyat kecil pada fasilitas pendidikan, kesehatan, pengembangan kasitas teknologi, pemasaran dan modal buat manusia.

Dengan diwujudkannya kelima pokok tersebut, demokrasi politik akan tumbuh berimbang dengan demokrasi ekonomi yang berjalan dalam demokrasi kerakyatan. Dengan dukungan kebijakan pembangunan yang memberi pengutamaan, afirmasi, bagi mereka yang lemah dan miskin, dengan hal itu medan kerja yang dihadapi oleh rakyat harus adil dan berimbang.

Demokrasi kerakyatan yang diinginkan Hatta mempunyai beberapa lapisan. Lapisan pertama dimulai di tingkat desa, yang memungkinkan diadakannya sebuah pemilihan langsung wakil rakyat oleh rakyat pemilih di desa. Lapisan kedua, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi, dan lapisan yang ketiga yang dilakukan di tingkat nasional melalui wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Tercermin dalam pola ini struktur pemerintahan dan sistem ekonomi yang terdesentralisasi. Desentralisasi politik telah terwujud melalui jalan pemilihan wakil rakyat di daerah, sedangkan desentralisasi ekonomi dilakukan dengan adanya persebaran usaha oleh rakyat desa dan daerah antara lain dengan dibentuknya koperasi. Keinginan Hatta yaitu sebuah bentuk perekonomian yang hasilnya bisa dipakai oleh rakyat.⁸

⁸ Salman Alfarizi, *op.cit.*, hlm. 107-108.

Dengan hal tersebut Hatta mengajukan konsepsinya mengenai demokrasi untuk Indonesia. Subtansi demokrasi menurut Hatta adalah *mass protest* atau sikap kritis terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tolongan-menolong. Hatta melontarkan tambahan, yaitu dua subtansi yang pertama menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi politik, sedangkan subtansi yang ketiga adalah dasar bagi demokrasi ekonomi. Dengan tiga subtansi tersebut, Hatta meyakini bahwa kedaulatan rakyat akan tercapai baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi.

Dibandingkan dengan demokrasi Barat yang hanya menjamin kedaulatan rakyat di bidang politik saja, tetapi demokrasi Hatta lebih bersifat umum. Dengan kata lain, demokrasi yang dibangun Hatta melibatkan dua demokrasi yaitu, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Hatta sendiri mengakui bahwa ada tiga sumber gagasan yang menjadi dasar pandangannya tentang demokrasi: *pertama* ajaran Islam mengenai kebenaran dan keadilan yang dikaitkan dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah (penyebar kebaikan) di alam bumi ini, *kedua* demokrasi yang hidup dalam masyarakat Indonesia berupa kehidupan yang berdasarkan kekeluargaan/kebersamaan, dan *ketiga* paham sosialisme Barat tentang perikemanusiaan.

Lewat ketiga ajaran inilah, Hatta secara tersirat menggambarkan tonggak-tonggak dalam proses sosial politik yang sudah dialaminya serta ingin mengemukakan bahwa proses sosialisasi yang sudah dialaminya menjadikan Hatta menganut paham sosialisme demokrasi atau demokrasi sosial menurut ajaran

Islam. Hatta secara pribadi mengakui bahwa ajaran Islam yang dipahaminya merupakan salah satu sumber pemikirannya mengenai demokrasi.⁹

Menurut Hatta, “ *bila manusia hidup seorang diri, ia akan mati karena rindu.*” Inilah inti dari semua konsep pemikiran Hatta tentang manusia. Manusia dari kodratnya adalah mahluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada orang lain, karena itulah manusia adalah makhluk sosial. Manusia hanya berarti, bermakna, dan ada dalam relasinya dengan makhluk yang lain. Hal yang sama diyakini, dihayati, dan diajarkan oleh Hatta. Keyakinan Hatta sangatlah penting dalam konteks pembangunan masyarakat baru, yaitu Indonesia merdeka. Semua konsep yang diajukan Hatta untuk membangun kedaulatan rakyat bersumber dari konsepnya mengenai kodrat manusia. Hatta yakin hal ini sebagai suatu kebenaran dan relitas mutlak dari kehidupan manusia.

Karena manusia mempunyai hak untuk hidup dan berkembang, masyarakat dan individu memiliki hak dan kewajiban mempertahankan kelangsungan hidup satu sama lain. Manusia juga membutuhkan kehidupan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dengan hal itu manusia juga membutuhkan akses-akses di bidang perekonomian. Politik juga harus dimasukan didalamnya, karena politiklah yang akan menata perekonomian masyarakat. Menurut Hatta, kehidupan ekonomi sangat lah pentinng dalam kelangsungan hidup manusia. Hatta juga yakin bahwa setiap penjajah (politik) yang sudah berlangsung di seluruh dunia termasuk negeri Indonesia didasari oleh motif ekonomi. Hal ini yang dinamakan ciri khas dan mendasar dari hidup manusia.

⁹ Zulfikri Suleman, *op.cit.*, hlm. 12-20.

Rakyat Indonesia tidak mudah meninggalkan sifat kolektivitasme. Rasa kebersamaan sudah menyatu di dalam setiap manusia Indonesia. Hatta pun yakin dengan hal ini. Sayangnya, rasa keberbersamaan hanya dimiliki oleh rakyat, dan rasa kebersamaan tidak ada sedikitpun dimiliki oleh para pejabat di atasnya dari dulu sampai sekarang. Para pejabat hanya mementingkan kekuasaan, otokrasi, dan individualisme. Hatta memang telah menguraikan bagaimana kedaulatan rakyat diterapkan di sebuah negara baru, Indonesia merdeka. Demokrasi Indonesia menurut dasar kedaulatan rakyat sudah tersusun dari bawah ke atas. Susunan demokrasi dari bawah ke atas tidak mungkin berhasil jika feodalisme berkuasa di atas.

Pemikiran Hatta mengenai perkembangan demokrasi Indonesia sangat diperlukan hingga saat ini. Banyak hal yang telah dituangkan oleh Hatta untuk negeri ini. Sebagaimana yang lihat, konsep demokrasi dalam pemerintahan serta konsep ekonomi lewat koperasi masih digunakan. Sosok Hatta yang pendiam dan tidak banyak bertanya perlu dicontoh perilakunya. Hatta pernah mengatakan tidak akan menikah sebelum bangsa Indonesia bebas dari penjajahan, pernyataan ini dibuktikan Hatta, ia menikah setelah bangsa Indonesia merdeka. Ia rela mengorbankan jiwa raganya bagi rakyat Indonesia, demi kesejahteraan dan kemerdekaan. Jasa-jasa Bung Hatta memang tak bisa ditinggalkan begitu saja, karena sudah memberikan yang terbaik bagi negara Indonesia. Inilah Hata yang penuh dengan tanda tanya tetapi tetap dicintai oleh rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pemikiran Hatta tentang sistem demokrasi kerakyatan. Adapun rumusan masalanya sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana biografi Mohammad Hatta?
2. Bagaimana pandangan Hatta tentang demokrasi barat?
3. Bagaimana konsep Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah.
- b. Sebagai bahan untuk melatih daya pikir yang kritis dan objektif terhadap peristiwa sejarah dalam penulisan karya sejarah.
- c. Melatih penyusunan sebuah karya sejarah dalam rangka mempraktikkan metodologi sejarah yang kritis.
- d. Menambahkan perbendaharaan karya sejarah.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui biografi Mohammad Hatta.
- b. Mengetahui pandangan Hatta tentang demokrasi barat.

- c. Mengetahui konsep Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Bagi Pembaca

- a. Pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai biografi Mohammad Hatta.
- b. Menambah wawasan terkait dengan pemikiran Hatta tentang demokrasi kerakyatan.
- c. Mengetahui bagaimana konsep Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan.
- d. Dapat menambah referensi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Bagi Peneliti

- a. Sebagai salah satu cara untuk mengukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan merekonstruksi sejarah.
- b. Melatih penulis untuk berfikir lebih objektif dan kritis.
- c. Penulis memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik mengenai eksistensi pemikiran Hatta tentang sistem demokrasi kerakyataan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dan dibutuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Kajian pustaka adalah telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi

landasan pemikiran dalam penelitian.¹⁰ Hal ini dimaksudkan agar penulisan dapat memperoleh data-data atau informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai permasalahan yang dikaji, diperlukan pustaka yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini ada beberapa pustaka yang digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan.

Buku pertama Karya Taufik Abdulah yang berjudul “*Mohammad Hatta Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*”. Buku ini digunakan penulis sebagai kajain pustaka untuk membahas rumusan masalah riwayat hidup Mohammad Hatta. Isi buku ini menceritakan secara mendalam tentang riwayat hidup Mohammad Hatta, Pendidikan, Penangkapan dan Hubungan dengan Dunia Internasional. Mengenai latar belakang Mohammad Hatta dijelaskan bahawa ia dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota kecil Bukittinggi, dengan nama Mohammad Athar. Kota Bukittinggi terletak di tengah-tengah dataran tinggi Agam. Letaknya sangat indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Ayah Hatta bernama H. Mohammad Djamil, Syekh Batuhampar seorang ulama besar yang sudah terkenal sampai keluar daerah.

Awal pendidikan Hatta dimulai di sekolah rakyat selama lima tahun, tetapi umur Hatta belum genap enam tahun, karena Pak Gaek ingin sekali Hatta sekolah, akhirnya Hatta disekolahkan di sekolah Belanda swasta milik Tuan Ledebore. Setelah enam atau tujuh bulan Hatta diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah rakyat. Pada petengahan tahun 1913 Hatta pindah ke sekolah MULO di Padang.

¹⁰ Jurusan Pendidikan Sejarah. *Pedoman Penulisan Akhir Tugas Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2006, hlm 3.

Setelah selesai Hatta melanjutkan sekolah ke Batavia dan melanjutkan lagi pendidikannya ke negeri Belanda, kuliah di *Handels-Hogeschool*. Dari sinilah Hatta banyak menyerap mengenai ilmu politik, tata negara dan sebaginya.¹¹

Buku *kedua* karya Deliar Noer berjudul “*Mohammad Hatta*” merupakan karya biografis yang menguraikan riwayat kehidupan Bung Hatta. Buku ini membahas tentang kehidupan Bung Hatta yang lahir di Bukittinggi dari keluarga saudagar, pada 12 Januari 1902. Cerita dilanjutkan dengan masa studi Hatta di Bukittinggi, Padang, dan Jakarta. Interaksinya dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim dan Abdul Muis turut berpengaruh atas mekarnya kesadaran politik Hatta, terutama kesadaran atas realitas sebagai masyarakat terjajah. Usai menamatkan sekolah di Jakarta Hatta kemudian melanjutkan studi ke Negeri Belanda untuk mematangkan ilmu ekonomi. Hatta juga giat dalam aktivitas politik dengan bergabung pada organisasi Perhimpunan Indonesia (PI), puncaknya adalah ketika Hatta duduk sebagai ketua organisasi.

Selain menjadi aktifis politik, Hatta juga melanjutkan kegemarannya yakni sebagai kutu buku. Seusai tamat Hatta kemudian pulang ke Indonesia dan segera terjun dalam pergerakan nasional. Ia bersama Sjahrir kemudian mendirikan PNI baru, organisasi ini memfokuskan diri pada aspek pendidikan politik. Sebagai imbas dari keterlibatannya di dunia politik, Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Boven Digul, kemudian dipindahkan ke Banda Naira. Hatta dipindahkan segera setelah pecah perang pasifik dan dibebaskan pada masa pendudukan Jepang.

¹¹ Taufik Abdulah, *op.cit.*, hlm. 1-5.

Pada masa pendudukan Jepang, Hatta mengambil langkah kooperatif terhadap Jepang. Persandingannya dengan Bung Karno menyebabkan ia mendapatkan julukan Dwi-Tunggal. Bersama Bung Karno, Hatta juga turut andil menjadi proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Kiprah politik Hatta dimasa kemerdekaan kian intensif berkat pengangkatannya sebagai wakil presiden. Pada masa inilah Hata, bersama Sukarno dan Sjahrir memegang tampuk kepemimpinan republik di tengah-tengah ancaman Belanda yang hendak berkuasa kembali. Konfrontasi dengan pihak Belanda berakhir lewat KMB, Hatta ditunjuk sebagai delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut. Pasca-kemerdekaan, Hatta tetap diakui sebagai pemimpin politik yang disegani, kendati dengan kewenangan yang sangat terbatas. Pada masa ini Hatta secara kritis mencermati dinamika politik liberal yang ditandai dengan fenomena kabinet seumur jagung. Menurutnya eksperimen demokrasi liberal sangat tidak sehat lantaran ultra-demokratis, dan cenderung tidak bertanggung-jawab.

Perbedaan konsepsi dengan Sukarno membuatnya memilih mundur sebagai wakil presiden. Drama terurai pecahnya mitos Dwi-Tunggal, terjadi pada 1956. Kendati tidak aktif lagi dalam politik, Hatta kerap mengikuti dan melakukan kritik atas perkembangan politik tanah air, salah satu kritik-nya yang terkenal tertuang dalam *Demokrasi Kita* yang menyorot dengan tajam otoriterisme Sukarno. Pergantian rezim kekuasaan dari Sukarno ke Suharto tetap menjadikah Hatta sebagai “warga negara biasa”, status yang terus disandang hingga akhir hayatnya pada 14 Maret 1980.

Buku *ketiga* karya Zulfikri Suleman yang berjudul “*Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*” menelaah pandangan Hatta tentang demokrasi yang relevan dengan realitas masyarakat Indonesia. Buku ini digunakan penulis sebagai kajian pustaka untuk membahas rumusan masalah asal mula dan perkembangnya demokrasi dan konsep dan pelaksanaan Mohammad Hatta mengenai sistem demokrasi kerakyatan. Sebuah gagasan politik idealnya dibangun berdasarkan realitas yang hidup dalam masyarakat. Demokrasi yang berkembang dan menjadi mapan di negara-negara Barat dibangun atas dasar karakteristik masyarakat Barat yang rasional dalam arti sekuler dan berpaham liberal dalam arti individualisme.

Dibentangkan pula aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pandangan Hatta tentang demokrasi, yang sebagaimana diakuinya secara pribadi berkisar pada tiga hal: ajaran Islam, kebudayaan masyarakat Indonesia yang bersendikan pada kolektivitas, dan ajaran sosialisme Barat tentang kemanusiaan. Buku ini juga menyertakan kritik Hatta atas demokrasi Barat yang menurutnya pincang, karena hanya mewujudkan kedaulatan rakyat dibidang politik saja, sedangkan di bidang ekonomi yang berlaku kedaulatan pemilik modal. Membangun demokrasi, perlu dibarengi dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada masyarakat banyak.¹²

Buku *keempat* yang berjudul “*Pokok-pokok Pemikiran Bung Hatta*” suntingan dari Joko Kahar dan Adib Susila merupakan himpunan atas karya-karya asli Hatta, di dalam buku ini membahas dua buku yang berjudul, seperti

¹² Zulfikri Suleman, *op.cit.*, hlm. 1-9.

Mendayung di Antara Dua Karang dan Demokrasi Kita. Buku ini digunakan penulis sebagai kajain pustaka untuk membahas rumusan masalah konsep dan pelaksanaan Mohammad Hatta mengenai sistem demokrasi kerakyatan. Isi buku menceritakan sosok Hatta, salah satu dari sekian banyak pendiri republik ini. Hal yang paling menonjol dari sosok Hatta yaitu keteguhan, tekad, dan konsistensi, tanpa memperdulikan getirnya konsekuensi dari tindakan dan langkahnya. Bersama Bung Karno, Hatta adalah sosok pemimpin yang sudah biasa merasakan pahitnya menjadi orang buangan, tahanan, dan pesakitan. Namun, Indonesia disegani di kancah dunia, karena Hatta mendapatkan gelar dwi-tunggal, walaupun diwaktu itu Indonesia baru merasakan kemerdekaan.

Hatta juga seorang politisi yang ulet dalam memainkan langkah-langkah cerdasnya, tidak hanya di kancah perpolitikan nasional, namun juga didunia internasional. Hatta juga seorang ahli diplomasi yang cerdas sekaligus negarawan yang tulus mengorbankan hidupnya untuk kemajuan dan kebebasan bangsa Indonesia. Seorang intelektual yang kerap memberikan gagasan orisinil dan segar.

Di dalam buku *Mendayung antara Dua Karang*, dan buku *Demokrasi kita*, Hatta tampaknya ingin menegaskan kepada bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya Indonesia berada di tengah jalur perhubungan internasional. Dari segi politik kita berada di bawah negara-negara besar seperti Amerika dan Soviet Rusia, dan apabila kita tidak pintar-pintar mendayung maka “biduk” kita akan karam membentur karang. Menurut Hatta, dengan sikap kehati-hatian, kita harus tetap tegas dalam menunjukkan eksistensi kita sebagai warga negara yang merdeka dan berdaulat.

Betapa pun lemahnya, kita sebagai bangsa yang baru merdeka dibandingkan dua raksasa yang bertentangan, Amerika Serikat dan Soviet Rusia, menurut anggapan pemerintah, harus tetap mendasarkan perjuangan kita atas adagium: “*percaya kepada diri sendiri dan berjuang atas tenaga dan kesanggupan yang ada pada kita*”. Kesulitan yang sudah dirasakan bangsa ini bertambah besar karena adanya aliran yang tidak bisa membedakaan revolusi nasional dan revolusi sosial. Revolusi nasional akan pincang bila disangkutpautkan dengan tujuan revolusi sosial. Diantara mereka juga ada yang meninggalkan teori itu dan mengajukan tidakan yang cenderung membangkitkan revolusi sosial.

Menurut Hatta, sekalipun pandangan kemasyarakatan berdasarkan pada sosialisme, belum tentu setiap orang mempunyai sikap nasionalis. Dari sudut pandang politik-nasional, kemerdekaanlah yang paling utama, sehingga segala tujuan dibulatkan kepada perjuangan mencapai kemerdekaan tersebut. Perhitungan utama ialah, *betapa aku akan mencapai kemerdekaan bangsaku dengan selekas-lekasnya*. Begitu besarnya simpatinya kepada aliran pemikiran yang lebih dekat padanya, Hatta telap teguh terhadap langkahnya sendiri didalam menghadapi masalah-masalah kemerdekaannya.¹³

F. Historiografi yang Relevan

Historiografi merupakan cara untuk mengkonstruksi suatu gambaran di masa lampau berdasarkan data yang sudah diperoleh. Menurut Louis Gottschalk

¹³ Joko S. Dan Kahar Adit Susila. *Pokok-Pokok Pemikiran Bung Hatta*. Jogjakarta: Buku Litra, 2012, hlm 138-141.

hitorografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa lalu. Penggunaan hitorografi yang relevan dalam penulisan sejarah merupakan salah satu komponen penting sebelum melakukan penulisan sejarah. Maksud dari hitorografi yang relevan yaitu untuk dapat membedakan karya sejarah yang akan ditulis dengan karya-karya sejarah yang sudah ada. Adapun hitorografi yang relevan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut.¹⁴

Skripsi *pertama* yang berjudul "Pemikiran Politik Luar Negeri Mohammad Hatta" karya Asep Muharudin mahasiswa juruan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun penulisan 2009. Skripsi ini membahas tentang pemikiran politik luar negeri Mohammad Hatta. Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan "kepanjangan tangan" dari politik dalam negeri sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu kondisi politik dalam negeri; kemampuan ekonomi dan militer; serta lingkungan internasionalnya. Sejak Bung Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" (1948), RI menganut "politik luar negeri yang bebas dan aktif" yang dipahami sebagai sikap dasar RI yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpowers; menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri; serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, RI

¹⁴ Hugino dan P. K. Poerwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1992, hlm. 35.

tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional.

Seperti diamanatkan konstitusi, RI juga menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini, dan menegaskan bahwa politik luar negeri harus diabdikan untuk kepentingan nasional. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi dalam perpolitikan dalam negeri akan mempengaruhi diplomasi sebagai manifestasi kebijakan luar negeri. Politik luar negeri Indonesia bukanlah politik netral, karena politiknya tidak ditujukan kepada dua negara atau lebih yang berperang. Politiknya mengenai sikapnya dalam perdamaian dan ditujukan untuk memperkuat dan membela perdamaian. Sebab itu politiknya ditegaskannya dengan sebutan "politik bebas", *Independent Policy*. Sering pula politik ini diperjelas coraknya dengan mengatakan "politik bebas yang aktif". Politik yang dijalankan oleh sesuatu negara tidak pula selalu sama dari dahulu sampai sekarang.

Skripsi yang *kedua* yaitu berjudul "Sejarah Pertentangan Soekarno –Hatta dan Pengaruh Kebijakan Politik Indonesia (1956-1965)" karya Hadi Hartanto mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tahun penulisan 2005. Skripsi ini mengkaji tentang pertentangan antara Soekarno dengan Hatta. Negara Indonesia lahir dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh dwitunggal Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui kedua tokoh inilah yang mengangkat Indonesia dalam percaturan politik Internasional, baik itu ketika masih dalam cengkraman kolonialisme Belanda maupun ketika masa pendudukan Jepang. UUD 1945

memang segera diberlakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, namun beberapa keputusan yang dibuat oleh PPKI ternyata tidak bisa berjalan sempurna terutama ide pembuatan partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan dari elit politik nasional pada waktu itu.

Kemudian dikeluarkan Maklumat pemerintah tanggal 4 Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. PPKI diubah menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang merupakan lembaga pembantu presiden sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945, Presiden Soekarno menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga tersebut terbentuk. Ternyata ketentuan tersebut di atas tidak dapat disetujui oleh sebagian elit politik republik baru tersebut karena mencerminkan kekuasaan presiden yang bersifat absolut dan otoriter.

Perbedaan persepsi tentang kekuasaan presiden ini adalah pertentangan politik pertama yang paling nyata di kalangan elit politik. Puncak dari adanya pertentangan tersebut muncul ketika dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden no. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang bertujuan mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah ketentuan yang diberikan oleh Aturan Peralihan Pasal IV tersebut. Maklumat Wakil Presiden No. X menetapkan bahwa kabinet presidensial yang diatur oleh UUD 1945 diubah menjadi kabinet parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR.

Soekarno-Hatta telah melalui perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka, tentu bukan hal mudah dilakukan oleh kedua tokoh di atas. Banyak hal yang

belum diketahui oleh kalangan sejarawan manakala mereka ternyata terlibat dalam pertentangan pendapat dalam beberapa masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertentangan ini telah ada semenjak mereka aktif dalam organisasi pergerakan pemuda menentang kolonialisme Belanda hingga akhirnya Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan pada tanggal 1 Desember 1956. Pengunduran ini beralasan untuk mengakhiri pertentangan antar keduanya. Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu tentang materi kajiannya. Penulis akan membahas tentang konsep Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Sejarah sebagai ilmu mempunyai metode tersendiri dalam mengungkap sebuah peristiwa di masa lampau agar menghasilkan penulisan sejarah yang kritis, ilmiah dan objektif. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁵ Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan yaitu: pemilihan topik, pencarian dan pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan sejarah (historiografi). Dari langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001, hlm, 39.

a. Pemilihan Topik

Tahap awal yang perlu dilakukan ketika akan melakukan penelitian sejarah adalah penentuan topik. Proses penentuan topik setidaknya berdasarkan kriteria kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.¹⁶ Pemilihan topik atau tema penelitian juga harus memperhatikan ketersediaan sumber sebagai salah satu faktor yang akan mempengaruhi jalannya penelitian.

b. Heuristik

Heuristik adalah sebuah kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tahap heuristik ini banyak menguras waktu, biaya, tenaga, pikiran dan juga perasaan. Dalam pencarian sumber, seorang peneliti harus mempunyai keuletan. Adapun pencarian sumber yang bisa dilakukan yang dengan mencari di perpustakaan, pusat arsip, museum, maupun melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku sejarah. Menurut sifatnya sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu.¹⁷

1) Sumber primer

Sumber primer ini dapat berupa kesaksian langsung dari pelaku (sumber lisan), dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip (sumber-sumber tertulis), benda atau bangunan-bangunan sejarah (sumber benda). Sumber primer haruslah

¹⁶ *Ibid*, hlm, 91.

¹⁷ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah*. Jakarta: Dephankam, 1971, hlm. 135.

sumber yang sejaman dengan peristiwa.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber primer sebagai berikut:

“Bangkitkan Kita Semuanja Kepada Demokrasi Stijel Baru”. *Suara Merdeka*, Senin 19 September 1957.

“Hatta; Apa Bila Kita Tjinta Demokrasi”. *Suara Merdeka*, Rabu 4 Desember 1957.

Mohammad Hatta. (1966). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.

Mohammad Hatta. (1953). *Dasar Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Tintamas.

“Kondisi Sosial Ekonomi”. *Mertju Suar*, Selasa 16 April 1957.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata. Sumber sekunder ini bisa berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, surat kabar atau buku-buku.¹⁹ Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi antra lain:

Deliar Noer, 2012. *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Kompas.

Joko S. Dan Kahar Adit Susila. 2012. *Pokok-Pokok Pemikiran Bung Hatta*. Jogjakarta: Buku Litra.

Salaman Alfarizi. 2010. *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980*. Jogjakarta: Garasi.

Taufik Abdullah. dalam kata pengantar buku, Mohhamad Hatta. 2010. *Untuk Negriku, Bukittinggi-Rotterdam Lewat betawi*, Jakarta.

Zulfikri Suleman. 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta, Kompas.

¹⁸ Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, a.b, Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 35-36.

c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyaring secara kritis data-data yang sudah diperoleh dengan melakukan kritik sumber. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketetapan (akurasi) dari sumber itu.

Kritik yang dilakukan yaitu kritik ekstern dan intern.²⁰ Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui apakah dokumen itu autentik (asli) atau tidak, dilihat dari segi bentuk, bahan, bentuk tulisan, dan seterusnya. Kritik internal adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, apakah dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, dikecohkan dan sebagainya. Kritik internal ditunjukan untuk memahami isi teks. Sumber-sumber yang sudah ada harus diseleksi dan penyeleksianya harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam melakukan tahapan ini langkah yang harus ditempuh adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang satu dengan sumber yang lain untuk membuktikan data yang telah dikumpulkan.

d. Penafsiran (interpretasi)

Tahap ini dilakukan untuk penafsiran dan menyimpulkan data yang telah diuji kebenaranya. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk diambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diambil. Setelah melakukan kritik atas sumber-sumber yang sudah diperoleh kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan makna, karena fakta historis masih terpisah-pisah. Kemampuan pribadi dan

²⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100-101.

perspektif yang berbeda akan menghasilkan makna dan bentuk karya sejarah yang berbeda pula. Semua diperbolehkan sejauh tidak menyimpang dari fakta-fakta yang dimilikinya.

e. Historiografi

Historiografi sama dengan penulisan sejarah. Tahap ini merupakan cara penulisan, pemaparan atau laporan hasil penelitian yang setiap bagianya terjabarkan dalam bab-bab yang jumlahnya tidak ditentukan. Hal yang harus dilakukan adalah menyusun fakta-fakta sejarah menjadi sebuah karya sejarah.²¹ Dari tahap pengumpulan sumber, menilai sumber dan menafsirkan sumber. Historiografi merupakan tahap terakhir yaitu menentukan data-data yang sudah ada menjadi sebuah kisah sejarah dalam bentuk sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh banyak orang.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan sejarah perlu adanya pengkajian metodologi dimana dalam metodologi tersebut diperlukan pendekatan ilmu lainnya. Penulisan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa akan tetapi menerangkan kejadian yang menjadi sebab-akibat, kondisi lingkungannya dan juga konteks sosial dan budaya.²² Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian sejarah untuk mempermudah dalam mengkaji dalam satu masalah, sehingga pendekatan yang bersifat multidimensional perlu digunakan. dengan mendekati suatu peristiwa

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 97-98.

melalui berbagai aspek kehidupan politik, sosiologi, kultural dan ekonomi. Dalam skripsi ini, akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, ekonomi, politik dan agama.

a) Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang menyangkut peranan faktor sosiologi yang menjelaskan peristiwa masa lalu. Pendekatan sosiologi akan membantu menjelaskan unsur-unsur sosial dalam suatu deskripsi antara lain tentang struktur golongan sosial, jaringan interaksi, struktur organisasi, pola kekuasaan, dan sebagainya.²³ Melalui pendekatan ini kita dapat mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Target utama sosiologi tidak lain adalah untuk meramalkan dan mengendalikan tingkah laku. Suatu gejala sosial sangatlah wajar dan relevan untuk dipelajari dengan pendekatan sosiologi. Dalam hal ini pendekatan sosiologi digunakan oleh penulis untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial Mohammad Hatta yang telah mempengaruhi pola pikir maupun karir Mohammad Hatta.

b) Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana manusia dan masyarakatnya melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep-konsep ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi, dan konsumsi yang berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi

²³ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 82.

sehingga dapat di pastikan hukum kaidahnya.²⁴ Pendekatan ekonomi ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui keadaan perekonomian sebelum Hatta merancang konsep demokrasi kerakyatan.

c) Pendekatan Politik

Pada dasarnya definisi politik yaitu menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Dengan demikian politik dalam suatu negara berkaitan dengan masalah kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik dan alokasi atau ditribusi.²⁵ Apa yang dimaksud dengan pendekatan politik adalah tinjauan yang menyoroti tentang kekuasaan, jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan seterusnya. Menurut Deliar Noer pendekatan politik merupakan segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan jalan mengubah dan mempertahankan sesuatu untuk susunan masyarakat. Pendekatan politik ini digunakan untuk melihat sejauh mana peranan Mohammad Hatta dalam dunia perpolitikan, mulai dari kegiatan berorganisasi sampai peranannya dalam pemerintahan setelah Indonesia merdeka.

d) Pendekatan Agama

Pendekatan agama merupakan pendekatan yang menekankan pada latar belakang ideologi yang mempengaruhi gerak dan berbagai peristiwa sejarah. Agama dapat menjadi pendorong terhadap perubahan sosial bahkan menjadi

²⁴ Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, Jakarta: Bhatara, 1996, hlm.32.

²⁵ Mariam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 8.

faktor yang menentukan.²⁶ Bagi bangsa Indonesia peranan agama berpengaruh terhadap nasionalisme bangsa. Munculnya berbagai organisasi keagamaan serta peran ulama menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Pendekatan agama digunakan dalam skripsi ini untuk mengetahui bagaimana kehidupan keagamaan Mohammad Hatta serta bagaimana kontribusi agama terhadap karirnya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang isi dari skripsi yang telah dibuat. Skripsi yang berjudul “Pemikiran Hatta Tentang Demokrasi Kerakyatan” ini memilih sistematik pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Historiografi yang Relevan, Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian, serta Sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi pembahasan yang terkait tentang biografi Mohammad Hatta baik itu latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, karir politik, dan karya-karya Mohammad Hatta.

Bab ketiga, memaparkan tentang pandangan Hatta tentang demokrasi barat. Didalamnya terdapat bagian-bagian seperti, awal mula lahirnya demokrasi,

²⁶ Thomas F. O’dea, “The Sociology of Religion”, a.b. Tim Penerjemah Yasogama, *Sosiologi Agama*. Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 153.

perkembangan demokrasi klasik, perkembangan demokrasi moderen/barat, dan Hata memandang demokrasi barat.

Bab keempat, membahas tentang konsep Mohammad Hatta tentang demokrasi kerakyatan. Didalamnya terdapat pengertian demokrasi kerakyata, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.

Bab kelima, satu kesimpulan akan disampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan jawaban dari apa yang menjadi pokok permasalahan yang ada dan disajikan dalam rumusan masalah.